

**Judul** : Pemerintah Diam-Diam Akomodasi Usul DPR  
**Tanggal** : Rabu, 23 Agustus 2017  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 1

## PEMERINTAH DIAM-DIAM AKOMODASI USUL DPR

Proyek gedung baru dan alun-alun demokrasi senilai Rp 601 miliar kembali dianggarkan.

JAKARTA – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru dan "alun-alun demokrasi" di Senayan berpeluang terwujud. Setelah sempat mencoret, pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk kedua proyek itu dalam pagu anggaran DPR untuk Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang akan dibahas.

Dokumen Kementerian Keuangan yang diperoleh *Tempo* menunjukkan bahwa dana Rp 601 miliar untuk dua proyek itu merupakan bagian dari tambahan pagu anggaran sebesar Rp 1,37 triliun untuk parlemen yang diputuskan pemerintah akhir bulan lalu. Duit tersebut merupakan ter-

min pertama dari rencana pembiayaan selama empat tahun. Adapun sisa Rp 769 miliar akan digunakan untuk menambah anggaran kegiatan penyerapan aspirasi, perjalanan dinas luar negeri, dan penguatan kelembagaan DPR.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, enggan berkomentar. "Lebih baik Kementerian Keuangan yang menjelaskan," katanya kemarin. Menurut dia, Bappenas hanya berfokus pada program prioritas nasional. "Gedung, kantor, apa pun, bukan bagian prioritas nasional."

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati belum merespons permintaan konfirmasi *Tempo*. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani—yang tak menampik adanya tambahan anggaran DPR itu—juga enggan memberikan penjelasan. "Tanya ke Sekretariat Jenderal DPR saja," katanya.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan surat edaran bersama tentang rencana pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja 2018 pada 25 Juli lalu. Anggaran DPR menjadi Rp 5,72 triliun. Sebelumnya, dalam surat edaran mereka pada Mei lalu, kedua proyek itu dicoret sehingga pagu indikatif untuk parlemen hanya Rp 4,35 triliun.

Pengalokasian kembali anggaran untuk dua proyek jumbo itu berkebalikan dengan isyarat pemerintah

selama ini: menolak permintaan wakil rakyat. Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, mengatakan moratorium pembangunan gedung baru pemerintahan masih diberlakukan demi efisiensi. "DPR kami harap juga memahami hal tersebut," kata Kalla di kantornya, Selasa pekan lalu.

Belum dapat dipastikan apakah rencana baru ini telah disetujui Istana. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, juga belum mendengar detail informasi tentang hal ini. "Sebaiknya ditanyakan ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Deputi Sekretariat Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Widadi, mendesak agar Jokowi membatalkan alokasi tersebut. "Di luar seolah-olah menolak, namun di dalam ternyata menyetujui," katanya. ● INDIRI MAULIDAR | ISTIMAN M.P. | AGONG

### Bolak-balik Proyek Gedung

Sempat dicoret, pemerintah dalam ancar-ancar anggaran tahun depan, proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat dan "alun-alun demokrasi" senilai Rp 601 miliar kembali diakomodasi dalam pagu anggaran untuk Dewan. Pemerintah dan DPR akan kembali membahasnya dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.



Bulet Proyek Alun-alun  
Parlemen Dikritik  
Halaman 9

● INDIRI MAULIDAR | HUSSEIN ABRI | AGONG | ILLUSTRASI: TEMPO/KENDRA PARAM